

LAPORAN PENELITIAN



PARTAI GOLONGAN KARYA DIGOYANG KONFLIK INTERNAL BERIMBAS KE KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

Nama : Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIDN : 0021094801

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
SAMARINDA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Partai Golongan Karya Digoyang Konflik Internal Berimbas Ke Kalimantan Timur**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Peneliti

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Fl. Sudiran, M.Si
- b. NIDN : 0021094801
- c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- d. Fakultas/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG 1945 Samarinda
- e. Nomor HP : 0811584639
- f. Surel (e-mail) : Fl.sudiran@yahoo.co.id

Samarinda, 7 Mei 2015

Mengetahui
Dekan,

Dosen Peneliti,

(Drs. Damai Darmadi, M.Si)
NIP. 195705041986011001

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

Menyetuju,
Ketua LPPM

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRACT	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. KERANGKA DASAR TEORI	3
A. Konflik secara umum.....	3
B. Konflik di Partai Golongan Karya	6
III. PEMBAHASAN	7
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

KATA PENGANTAR

Partai Politik merupakan pilar paling penting karena proses pemerintahan tidak bisa lepas dari dukungan politik. Di Indonesia ada beberapa partai yang ikut Pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gololongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI). Partai sebagai pendukung pemerintah dengan perwakilannya di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang berfungsi sebagai pengawas, legeslasi dan anggaran maka kedudukan mereka sangat strategis. Demikian pula Partai Golkar amat diperlukan dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Hemat penulis bahwa kisruh Partai Golkar akan menghambat jalannya pemerintah misalnya dalam pengesahan Rencana Undang-undang menjadi yang harus segera dilaksanakan. Pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla amat sangat berkepentingan sehingga sangat berharap Partai Golkar segera selesaikan problemanya. Bila konflik ini tak selesai rakyat sangat dirugikan karena anggaran dapar terganggu. Dalam tulisan ini peneliti mengadakan penelitian kepustakaan yang hasilnya seperti di bawah ini.

Samarinda, Mei 2015

Florentinus Sudiran

ABSTRACTS

The aim of this research is to know the internal conflict in GOLKAR partai which HAS influenced to the local governments. The method of the research is library one. The references are taken from the literature of the library in Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. The most significant materials are taken from the local newspaper Tribun Kaltim and Kaltimpost. The research has been carried out for one month in Samarinda. Political party is the key of the government so it is badly needed to support the legislative, executive and judicative as well because it is the representative body of the peoples. So if it is involved the conflict either the internal or external it will disturb not only the government but also the state. Really any conflict will make emotion and anger which are dangerous for the peoples throughout the country. The conflict started from the error of some members to hold a National Dialog in Bali which must be held in January 2015 not in December 2014 as arranged in the decision of the Riau National Dialog. Then it has become the fire of the conflict between the two blocks of Aburzal Bakrie against Agung Laksono. The main core of conflict is egoism. It causes to make two blocks which are useless. The results of the conflict is the loss of the peoples' trust. The two blocks directed by Vice President Yusup Kala and the president Joko Widodo will help them solve the problems. The suggestions of this research is (1). Both have a good will (2). Both must arrange the National Dialog (3). No one will be dominant (4). If the conflict goes on it will be collapsed.

Keywords : conflict, peoples, political, party, loss.

I. PENDAHULUAN

Menurut Kaltimpost tanggal 11 Januari 2016, Prahara di tubuh DPD Golkar Kaltim kepemimpinan Mukmin Faisyal bukan kali pertama menerpa. Jauh sebelum gejolak jelang percepatan penyelenggaraan musyawarah daerah (musda) provinsi pada 7 Januari 2016, sejumlah “perpecahan” menghiasi perjalanan kepengurusan dengan masa bakti 2009-2015 itu.

Kekalahan Neni Moerniaeni di Pemilihan Wali Kota Bontang 2011 dari Adi Darma mengawali perseteruan. Mukmin kala itu mendepak suami Neni, Sofyan Hasdam (mantan walikota Bontang) dari kepengurusan Golkar Kaltim. Setelah itu Adi Darma dirangkul dan diberi posisi ketua harian Golkar Kaltim.

Dua tahun berselang, DPD Golkar Kaltim memplenokan mengganti lima pimpinan DPD kabupaten/kota. Selain Samarinda, juga Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan Kutai Barat. Namun, belakangan pengurus provinsi meralat bahwa hanya Samarinda dan Balikpapan yang sudah dikeluarkan surat keputusan. Sementara itu, SK tiga daerah lainnya belum dikirimkan.

Pengamat sosial dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Sarosa Hamongpranoto mengatakan, patut disayangkan partai sekaliber Golkar mudah sekali mengalami gejolak internal. Memang, untuk masalah terbaru tak bisa dilepaskan dari kekisruhan luar biasa di level pusat. Terbentuknya dua kubu tidak menguntungkan pengurus di daerah. Kan daerah dituntut loyalitas sama DPP. Saat pecah terbagi jadi dua kubu. Perkembangan berikutnya ada kubu yang dinyatakan sah. Di bawah yang sudah berkiblat menang, lalu bereaksi menyesuaikan dengan di atas (Sarosa,2016). Tak ditampiknya persoalan internal ini nuansa politiknya begitu tinggi. Golkar mestinya lekas menyadari sebagai partai besar untuk mempertahankan kebesarannya. Para pengurus, lanjutnya, harus bersatu padu dengan duduk bersama menyelesaikan masalah. Gejolak yang berulang kali terjadi, menurutnya karena faktor ketidakpuasan para pihak

yang kepentingannya tidak terakomodasi. Di daerah, persoalan itu mengerucut pada jabatan. Jadi rebutan. Ini berpengaruh terhadap kebijakan yang sudah diatur secara politis. Mereka yang merasa mendapat dukungan lalu mengkristalkan ke bawah untuk menyingkirkan yang tidak mendukung. Wajar dalam parpol," terang guru besar humaniora Unmul tersebut. Namun, menjadi bahaya bagi partai ketika upaya penyingkiran itu sampai ke atas. Reaksi para lima pimpinan DPD kabupaten/kota yang terkena sanksi pembebasan sebagai ketua lalu mengadu ke pengurus pusat. Itu merupakan salah satu pelarian dengan mengadu ke sana. Sebab, saluran yang tersedia hanya itu saja. Kembalikan saja ke AD/ART atau peraturan organisasi lainnya. Itu saja yang di ikuti untuk menyelesaikan masalah internal.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Konflik secara umum

Pengertian Konflik (secara sosiologis) dapat dipahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader).

Batasan pengertian konflik bencana alam sosial yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah suatu konflik atau kerusuhan sosial yang melibatkan dua kelompok masyarakat atau lebih, kelompok kekerabatan, komunitas, pemeluk agama tertentu yang menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda dan mengganggu stabilitas sosial.

1. Faktor penyebab konflik bencana sosial

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa negara Indonesia (termasuk Kaltim), secara geografis maupun sosiologis, dapat dikategorikan sebagai wilayah yang rawan bencana sosial (konflik sosial) maupun bencana alam.

1.1. Secara sosiologis, dengan kondisi masyarakat yang plural/majemuk akan suku, agama, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan serta tingkat kesadaran sosial warganya menyebabkan kondisi rawan akan bencana sosial.

1.2. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kerusuhan horizontal di masyarakat yang antara lain dilatarbelakangi oleh konflik agama, ras, suku, ekonomi, politik dan/atau perpaduan dari antaranya. Kerusuhan horizontal mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan

juga spiritual, serta berkebarnya rasa kebencian dan dendam kesumat.

1.3. Konflik Etnis di Kalimantan Barat. Akibat lanjutannya adalah terhentinya kerjasama antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, terjadi rasa permusuhan, terjadi hambatan, bahkan kemandegan perkembangan kemajuan masyarakat dan akhirnya dapat memunculkan kondisi dan situasi disintegrasi sosial maupun disintegrasi nasional yang menghambat pembangunan.

1.4. Fakta sosial sampai sekarang juga menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi, demokrasi (PILKADA) yang dinilai terlalu euforial menyebabkan konflik politik tidak terkelola dengan baik. Ekses sosial dari konflik tersebut antara lain pernah terjadi kerusuhan massa dengan segala akses lanjutannya. Konflik Pilkada di Minahasa, Mojokerto, Tuban, Papua, Kota Waringin Barat (2012) dan lainnya.

1.5. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah yang rawan akan bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan dan lain sebagainya. Identifikasi pemicu konflik bencana sosial dari aspek keetnisan, kebudayaan, ekonomi, politik serta perpaduan diantaranya di Indonesia dari aspek :

2. Aspek Keetnisan :

- a. Adanya etnis tertentu ingin menguasai wilayah etnis lainnya.
- b. Adanya pelecehan satu etnis ke etnis lainnya.
- c. Adanya hak dan kewajiban lintas etnis yang tidak dipenuhi.
- d. Adanya intervensi pihak pemerintah dan atau pengusaha atas hak ulayat etnis.
- e. Diskriminasi dalam akses peluang kerja bagi etnis tertentu.
- f. Ketidakadilan dalam distribusi pemerataan pembangunan wilayah etnis tertentu.

3. Aspek Kebudayaan :

- a. Adanya cara pandang yang berbeda seseorang/kelompok/komunitas/negara tertentu terhadap nilai agama, pemaksaan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan drastis sistem mata pencaharian pada tatanan ekonomi, intervensi keorganisasian sosial oleh pihak tertentu, internalisasi kesenian dan kebudayaan lain secara paksa atau kedalam masyarakat tertentu.
- b. Pemaksaan perubahan budaya warga sesuatu etnis ketika memasuki lapangan kerja.
- c. Monopoli dan eksploitasi sumber hajat hidup masyarakat kebanyakan.

4. Sumber Konflik :

- a. Konflik berakar dari masyarakat lokal, marginalisasi peluang ekonomi, perebutan kekuasaan antar elit politik, isu pelecehan agama baik beda agama maupun sesama agama berbeda aliran kepercayaan.
- b. Konflik berakar pada pembicaraan yang menyinggung perasaan, ketidakseimbangan penguasaan lapangan pekerjaan, tidak mau memahami hak-hak tetangga, penghinaan keyakinan agama dan suku, kesenjangan sosial dan ekonomi.
- c. Konflik antara pemerintah dengan rakyat, antara lain bersumber dari eksploitasi sumber daya alam, atau intervensi kebijakan/regulasi.
- d. Konflik berakar dari ketersinggungan perasaan, penguasaan lapangan pekerjaan oleh warga tertentu, eksklusifme internal agama maupun suku.
- e. Konflik dipercepat dan didahsyatkan lewat provokasi dan provokator lokal, daerah, pusat hingga internasional.

B. Konflik di Partai Golongan Karya

Merujuk Pasal 40 UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Untuk membentuk perahu politik, syarat minimum pendaftaran calon kepala daerah, yaitu diusung partai politik atau gabungan politik yang memiliki paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Bila di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, total kursi sebanyak 55, perlu 11 kursi saja. Sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 level provinsi, Golkar adalah penguasa DPRD Kaltim dengan 13 kursi. Di bawah posisi Golkar yaitu, PDI Perjuangan dengan 10 kursi dan Gerindra 6 kursi. Dengan komposisi itu, hanya Golkar yang mampu memajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri tanpa berkoalisi. Bagi Mukmin, Pilgub 2018 kelak merupakan hajatan terakhir mengingat usia mantan ketua DPRD Kaltim itu sudah menginjak usia 68 tahun. Tak beralasan apabila Mukmin membidik posisi nomor satu di Kaltim itu. Salah seorang sumber internal di DPD Golkar Kaltim tak menampik bahwa musda menjadi arena berebut kekuasaan. "Kalau berbicara itu (ketua DPD), target berikutnya memang Pilgub 2018," ucap sumber terpercaya kepada *Kaltim Post*. Ditambahkan, kondisi sekarang dengan penunjukkan lima plt ketua DPD kabupaten/kota menguntungkan Mukmin. Dengan skenario itu, Mukmin mengantongi sembilan dukungan dari pemilihan hak suara dalam musda provinsi. Secara hitung-hitung, wakil gubernur Kaltim itu unggul. Total pemilik suara hanya berjumlah 16. Jadi kalau mengantongi 9 berarti sudah lebih dari 50 persen.

III. PEMBAHASAN

Perintah penyelenggaraan musyawarah daerah (musda) Partai Golkar Kaltim oleh dewan pimpinan pusat (DPP) pada 7 Januari 2016 mendadak ramai diperbincangkan. Kursi sang ketua, menjadi seksi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa agenda pemilihan tersebut digadang-gadang menjadi arena bertanding dua kader beringin. Mereka adalah “petahana” Mukmin Faisyal dan ketua DPD Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Di luar itu, ada kader potensial Golkar lain, yakni mantan bupati Berau Makmur HAPK, mantan bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap, dan mantan anggota DPRD Kaltim Andi Burhanuddin Solong. Bukan tanpa alasan, gejolak menjelang Musda Golkar Kaltim erat dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Barangkali wacana itu terlampaui dini bagi masyarakat. Namun, bagi mereka yang berambisi melanjutkan kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak (AFI), menduduki jabatan ketua DPD Golkar Kaltim merupakan salah satu jalan. Mereka yang berhasil menggenggam jabatan ketua DPD Golkar Kaltim membuat jalan ke Kegubernuran Kaltim lebih lengang. Namun, sekretaris DPD Golkar Kaltim Akhmad Albert membantah. Masih terlalu jauh bila berpikir Pilgub 2018. Memang diakuinya, beringin menjadi satu-satunya partai Benua Etam yang bisa mengusung calon sendiri. “Selebihnya, saya *no comment*. Kami sepakat satu pintu melalui Pak Dahri (Yasin),” terangnya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), DPD Golkar Kaltim, Dahri Yasin mengatakan, musda provinsi mutlak dilaksanakan. Lagi pula, panitia pengarah dan panitia pelaksana musda sudah terbentuk. Ditandai keluarnya Keputusan DPD Golkar Kaltim bernomor SKEP-112/DPD/GOLKAR/XII/2015 tentang Panitia Penyelenggara Musda Golkar Kaltim yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal dan Sekretaris Akhmad Allbert pada 30 Desember 2015.

Dalam surat itu, Dahri sebagai ketua pengarah dan Yunus Nusi sebagai ketua pelaksana. Dia selaku ketua panitia pengarah mengaku, masih bernegosiasi dengan DPP untuk mengundur waktu agar persiapan lebih

matang. Lagi pula, lanjutnya bertepatan pelaksanaan musda, ketua Golkar Kaltim sedang *medical check-up* dan umrah. Menurut rencana, dari 5-22 Januari. “Setidaknya (musda) Februari. Itu juga masih dibicarakan dengan DPP kalau disetujui. Tinggal menunggu jawaban (Dahri,2016).

Sukses pemilihan kepala daerah melahirkan banyak catatan bagi partai politik (parpol), utamanya bagi Partai Golkar yang masih dilanda kisruh di level pusat. Entah karena kisruh atau mekanisme penjurian bakal calon kepala daerah rumit, sehingga kader Golkar memilih jalan sendiri.

Setelah Neni Moerniaeni dan Rita Widyasari memilih maju pilkada melalui jalur independen (perseorangan), kini Nusyirwan Ismail melepas status sebagai kader Golkar. Kalangan praktisi politik menilai, sikap kader tersebut merupakan pukulan bagi Golkar. Beringin juga bisa dianggap tak mampu jaga kader.

Bagaimanapun Neni, diketahui pendulang suara Golkar di Kaltim, hingga salah satu wakil Benua Etam di Senayan. Peran Rita tak kalah moncer dengan torehan 19 kursi di DPRD Kukar, serta empat kursi Golkar Kukar-Kubar-Mahulu untuk DPRD Kaltim.

Sementara itu, Nusyirwan meski terbilang baru di Golkar, tapi posisi dia sebagai bakal calon petahana patut menjadi bagian dari aset Golkar. Alasannya, Nusyirwan mundur dari Golkar, bukan karena tak sejalan dengan visi dan misi partai. Tapi, lebih kepada akad untuk menjadi wakil dari Syaharie Jaang. Nursyirwan (2016,Kaltimpost) menyatakan memang sudah komit untuk berada di JaaNur jilid dua,” kata Nusyirwan di Balai Kota Samarinda, kemarin. Dia menyatakan, surat pengunduran diri sebagai kader Golkar telah dibuat pada 8 Juni. Suami Sri Lestari itu mengakui, dirinya belum optimal dalam program Golkar.

Sudah menjadi rahasia umum, ketika Nusyirwan dipercaya memimpin perhelatan akbar HUT ke-50 Golkar di Gor Segiri beberapa waktu lalu, dia tak berhasil meyakinkan pentolan beringin. Persoalannya terletak pada faktor finansial. Bukan hal tabu organisasi politik melihat itu sebagai bentuk minim loyalitas.

Yang cukup menyakitkan, Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal HP terang-terangan tidak mengakui Nusyirwan sebagai kader. **“Kalau Golkar sudah melihat dan memberikan penilaian tak apa, saya sudah siap dengan surat pengunduran diri. Tapi, saya tetap hormat dengan partai itu Saya kembali kepada keinginan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menginginkan saya kembali berpasangan dengan Jaang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survey. Politik dinamis. Wajar bila ada perubahan dan pergerakan. Kendati demikian, manuver politik yang dilakukan Nusyirwan banyak disayangkan. “Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai etika politik. Saya tak ingin berdebat mengenai hal tersebut. Yang penting saya tak melawan arus dan mengikuti keinginan masyarakat. Saya sudah meyakini JaaNur jilid dua. Saya ada feeling ke situ. Haqqul yakin saja. Enggak ada mahar politik, intinya kan bagaimana meyakinkan partai dengan kemampuan yang dimiliki. Saya berharap PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan Demokrat (Nursyirwan,2016)**

Tak hanya dengan Golkar, Nusyirwan juga memohon maaf untuk menarik diri dari penjaringan PDI Perjuangan. Walau begitu, Nusyirwan dan beberapa nama lain tetap dibawa ke DPP untuk meminta rekomendasi banyak pentolan partai dibuat kecewa dengan pilihan Jaang. Sebut saja Jafar Abdul Gaffar, Darlis Pattalongi, Sarwono, Saefuddin Zuhri, atau Dayang Donna Faroek. Selain alasan ingin berpasangan dengan Jaang, ada kabar mengenai permintaan mahar politik dari PDI Perjuangan yang tak sanggup ditunaikan Nusyirwan, sehingga memilih mundur. Namun, Nusyirwan menampik rumor itu.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim (Akhmad Albert,2016) mengaku santai mendengar Nusyirwan mengundurkan diri sebagai kader Golkar. **“Enggak ada masalah, santai saja kami ini. Saya sudah menerima berkas permohonan pengunduran diri yang diantar staf Nusyirwan, Senin (22/6). Surat sudah diterima, belum dibaca dalam Golkar tak ada mahar politik. Soal pengunduran diri Jaang dari**

penjaringan Golkar, menurut Albert, itu hanya penyampaian secara informal melalui salah seorang kader beringin. Itu hak seseorang dalam menentukan sikap politik. Tapi, dalam berpolitik juga ada etika yang harus dijunjung tinggi (Akhmad Albert,2016).

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Katim, Mukmin Faisyal membenarkan, jika ada isu atau kabar enam kabupaten/kota telah melayangkan surat usulan mempercepat Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Kaltim. Kisruh ini terkait momentum memasuki pemilihan gubernur, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari kekuasaan. Menurut Mukmin, persoalan kisruh di tubuh Golkar menjelang Musda dan Pilgub menjadi ajang bagi kader Golkar yang ingin memanfaatkan kursi kekuasaan.

“Ada yang kebelet mau jadi ketua partai, kebelet maju di Pilgub, dan kebelet jadi Ketua DPRD Kaltim. Inilah situasi politik saat ini. Semua harus memiliki landasan dan dasar yang jelas untuk kepentingan partai dulu. Sampai sekarang, belum ada jadwal Musda. Kalau ada yang sebut tanggal 26-27 Januari, itu tidak benar. Kami di Bali hanya rapat konsultasi, bukan koordinasi. Keputusan Musda akan dibahas dirapat pimpinan tanggal 23 Januari. “Banyak yang bernafsu jadi Ketua Golkar (Kaltim). Karena semua mau jadi Gubernur Kaltim. Jadi tujuannya (merebut kursi Ketua Golkar) bukan mau membesarkan partai. Tapi kebelet mau jadi Gubernur. Sudah tidak tahan,” kata Mukmin yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kaltim. Mukmin juga mengungkapkan informasi yang mengatakan Golkar Kaltim akan menggelar Musda Balikpapan, 27 Januari ini, merupakan informasi sesat. “Siapa yang bilang tanggal 27? Itu Golkar liar yang bilang Musda tanggal 27”. (Mukmin,2016).

Isu yang beredar, enam kabupaten/kota yang dikabarkan telah melayangkan surat usulan Musda dipercepat yakni, DPD II Golkar Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Samarinda, yang menjabat Wakil Gubernur Kaltim. Pemilihan Gubernur

(Pilgub) Kaltim, masih dua tahun lagi. Namun, atmosfer jelang hajatan tersebut, rupanya sudah menyerpa Golkar Kaltim. Hal ini diungkapkan Ketua DPD Golkar Kaltim, Mukmin Faisyal, Kamis (Tribun Kaltim,7/1/2016).

Mukmin yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim ini mengatakan upaya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Daerah (musda) Golkar, dilakukan oleh kelompok yang ingin menggunakan perahu Golkar di Pilgub Kaltim nanti. Diketahui, Golkar Kaltim menjadi pemenang Pemilihan Legislatif 2014 lalu, dengan raihan 13 kursi di DPRD.," tegas Mukmin.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Partai Golongan Karya Pusat Pusat (Golkar) saja kacau balau begitu. Imbasnya ke daerah antara lain ke pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur. Pengurus Pusat (DPP) tidak sah semua masa mau mengatur yang di bawah maka jadi tidak sah juga. Para pakar hukum bilang, dua-duanya Golkar di Pusat itu tidak sah. Daerah seyogyanya tidak menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Saran – saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Semua pihak harus mengendalikan diri;
2. Pemerintah harus ikut menyelesaikan;
3. Persoalan akan selesai dengan menggelar Musyawarah nasional;
4. Mahkamah partai adalah lembaga yang harus aktif menyelesaikan;
5. Negosiasi kedua kubu harus tidak ada yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, Akhmad, 2016, Sekretaris Partai Golkar, Kaltim, Samarinda.
- Faisal, Mukmin, 2016, Ketua Partai Golkar, Kaltim, Samarinda.
- Ismail, Nursyiwani, 2016, Wakil Wali Kota Samarinda.
- Jubaidi, Akhmad, 2014, Hasil Penelitian Pemetaan Bencana Sosial dan Bencana Alam di Kalimantan Timur, Samarinda.
- Metro TV, 2016 dalam dialog dengan Akbar Tanjung pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 19.00 WIB, Jakarta.
- Metro TV, 2016, dalam dialog dengan Ikrar Nusa Bhakti pada tanggal 5 Januari pukul 17.00 WIB, Jakarta.
- Metro TV, 2016, dalam Komentar Berita Sore pada tanggal 8 Januari 2016, Jakarta.
- Metro TV, 2016, dalam Prime Time News pada tanggal 14 Januari pukul 17.00 WIB, Jakarta.
- Metro TV, 2016, dalam Stop News 2 pada tanggal Januari 2016 pukul 20.00 WIB, Jakarta.
- Ruslamiyati. 2016, dalam Watchapps. Jakarta.
- Surat Kabar Harian KaltimPost 2015 dan 2016, Samarinda.
- Surat Kabar Harian TribunKaltim Post 2015 dan 2016, Samarinda.
- TV ONE, 2016, pada warta berita mulai dari 20 Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2016, Jakarta.
- TVRI. Berita Nasional, 2016.
- Yasin, Dahri. 2016, Humas Partai Golkar, Kaltim, Samarinda.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743391
Email : lp2m@untag-smd.ac.id

SURAT TUGAS

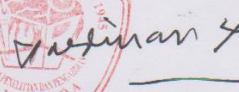
Nomor : 042/ UN.17/LPPM/P/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menugaskan kepada :

Nama : Prof. Dr. Florentinus Sudiran, M.Si
NIDN/NIP : 0021094801
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Fakultas / Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Penelitian : Partai Golongan Karya Digoyang Konflik Internal Berimbas Ke Kalimantan Timur

Untuk melaksanakan penulisan jurnal hasil penelitian dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul diatas, dan akan memberikan laporan akhir penelitian (hardcopy dan softcopy) ke LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 5 November 2015
Ketua LPPM,

Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001